

**LEGAL ANALYSIS OF POWER TO SALE  
IN RECOGNITION CERTIFICATE DEBT  
AT BRI BRANCH PURWOREJO**

**ABSTRACT**

by :

**Nur Widayanto<sup>1</sup> Sutanto<sup>2</sup>**

The purpose of this research and is, first to determine the validity of a deed of ucknowledgement of debt which includes the power to sell the items delivered as collateral for the debt and to determine the Legal Protection By As an official Notary Deed of Acknowledgement of Debt maker.

This research is descriptive analytical research which describes and explains the result of the analysis of the research object systematically. The data used in this research is secondary data, ie data obtained and the literature through the study of documents supported by primary data, ie data obtained directly and field by using data collection tools such as structured or unstructured interviews. The data have been collected and analyzed qualitatively made in the form of research report descriptive.

The results showed that the validity of deed of acknowledgment of debt which includes the power to sell the items submitted as security for a debt that is a valid if the power does not include absolute power is the power that can be revoked by the authorizing. If the absolute power of the listed conditions are not met, namely kosher causa statutory provision specifically Instruction Ministry of Home Affair Number: 14 of 1982 On the Prohibition of Use of Authorization Absolute Displacement Land Rights Asif the objects aguarantee of land rights. While the Legal Protection for the Parties Make the relevant documentation by deed Recognition Debt is still lacking of public awareness of the absolute power and lack of understanding about the type of power Notary. To the legal protection that can be performed by a Notary in debt acknowledgment deed is advised to use a guarantee istitution in accordance with the provisions of the legislation; if the deed Deed of Acknowledgement of Debt nature, then it must be the separation deed is made of 2 (two) certificate which Deed and Deed of Acknowledgement of Debt Authorization to Sell; and the Deed of Acknowledgement of Debt outstanding and accompanied by a Deed of Authorization to Sell should include clauses sales voluntarily by the debtor and if not able to do it then do sale by auction.

Keywords: Protection of Law, Attorney, Deed of Acknowledgement of Debt.

---

<sup>1</sup> Student, Master of Notary, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

<sup>2</sup> Lecture, Master of Notary, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KUASA MENJUAL  
DALAM AKTA PENGAKUAN HUTANG  
DI BRI KANTOR CABANG PURWOREJO**

**INTISARI**

**Oleh :**

**Nur Widayanto<sup>1</sup> Sutanto<sup>2</sup>**

Tujuan penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui keabsahan suatu akta pengakuan hutang yang memuat kuasa untuk menjual benda yang diserahkan sebagai jaminan atas hutang tersebut dan untuk mengetahui perlindungan hukum oleh notaris selaku pejabat pembuat akta pengakuan hutang.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan hasil analisis terhadap obyek penelitian secara sistematis. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan melalui studi dokumen yang didukung oleh data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Data-data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan suatu akta pengakuan hutang yang memuat kuasa untuk menjual benda yang diserahkan sebagai jaminan atas hutang yaitu sah apabila dalam kuasa tersebut tidak mencantumkan kuasa mutlak yaitu kuasa yang tidak bisa dicabut kembali oleh pemberi kuasa. Jika tercantum kuasa mutlak maka syarat causa halal tidak terpenuhi yaitu melanggar ketentuan undang-undang khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah jika obyek jaminan adalah hak atas tanah. Perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat akta yang berkenaan dengan akta pengakuan hutang masih kurang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kuasa mutlak dan kurangnya pemahaman notaris mengenai jenis kuasa. Untuk itu perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta pengakuan hutang adalah menyarankan untuk digunakannya lembaga jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; jika akta tersebut sifatnya akta pengakuan hutang, maka harus adanya pemisahan akta yaitu dibuatnya 2 (dua) buah akta yaitu akta pengakuan hutang dan akta kuasa untuk menjual; serta pada akta pengakuan hutang biasa dan disertai adanya akta kuasa untuk menjual harus mencantumkan klausula penjualan sukarela oleh debitur dan jika tidak mampu melakukannya maka dilakukan penjualan melalui lelang.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Kuasa, Akta Pengakuan Hutang.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.